



Analisis Framing Polri pada Penanganan Demonstrasi Tunjangan DPR di Kompas.com dan Detik.com

A Framing Analysis of the Indonesian National Police in Handling the DPR Allowance Demonstration on Kompas.com and Detik.com

Adilla Putri Hanita¹, M. Fikri Akbar², Sandy Allifiansyah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka – Rawamangun – Jakarta Timur – DKI Jakarta

***Corresponding Author: E-mail: adilla_1410622019@mhs.unj.ac.id**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Nov, 2025

Revised: 25 Dec, 2025

Accepted: 19 Jan, 2026

Kata Kunci:

Framing Media, Peran Polri, Demonstrasi DPR, Agenda-Setting, Konstruksi Sosial

Keywords:

Media Framing, Role of Polri, DPR Demonstration, Agenda-Setting, Social Construction

DOI: 10.56338/jks.v9i1.9905

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis liputan media mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam demonstrasi menentang tunjangan DPR pada Agustus 2025, guna mengungkap pengaruhnya terhadap opini publik di era demokrasi Indonesia, khususnya melalui media digital yang dapat memicu perpecahan sosial. Metode yang diterapkan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus pada artikel berita dari Kompas.com dan Detik.com; sampel terdiri dari 5 artikel relevan per media (dalam bahasa Indonesia dan secara eksplisit menyebutkan peran Polri), dikumpulkan melalui studi dokumen primer dengan pencarian kata kunci online, dan dianalisis melalui analisis konten kualitatif termasuk pengkodean tematik, interpretasi, dan perbandingan pola penyajian. Temuan utama menunjukkan bahwa Kompas.com menggambarkan peran Polri dalam sorotan negatif (sebagai represif dan memicu konflik), sementara Detik.com lebih positif-netral (humanis dan mendukung), yang mempengaruhi opini publik dan pembentukan persepsi sosial, sehingga menekankan pentingnya literasi media untuk mengurangi bias.

ABSTRACT

This research aims to analyze media coverage of the role of the Indonesian National Police (Polri) in demonstrations against DPR allowances in August 2025, in order to reveal its influence on public opinion in the era of Indonesian democracy, particularly through digital media that can trigger social division. The method used was a qualitative descriptive approach, focusing on news articles from Kompas.com and Detik.com; the sample consisted of 5 relevant articles per media outlet (in Indonesian and explicitly mentioning the role of the Polri), collected through primary document studies with online keyword searches, and analyzed through qualitative content analysis including thematic coding, interpretation, and comparison of presentation patterns. The main findings show that Kompas.com portrays the role of the National Police in a negative light (as repressive and conflict-provoking), while Detik.com is more

positive-neutral (humanistic and supportive), which influences public opinion and the formation of social perceptions, thus emphasizing the importance of media literacy to reduce bias.

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika demokrasi pasca-reformasi Indonesia, demonstrasi massal sering menjadi arena untuk mengekspresikan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk isu-isu sensitif seperti rencana peningkatan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demonstrasi terkait tunjangan DPR, yang melibatkan berbagai kelompok seperti mahasiswa, pekerja, dan aktivis masyarakat sipil, sering kali mengakibatkan intervensi dari Polri untuk menjaga ketertiban umum. Penanganan demonstrasi oleh Polri sering memicu kontroversi, mulai dari tuduhan penggunaan kekerasan berlebihan hingga upaya dialog yang dianggap tidak efektif, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum. Peran media digital dalam proses pembingkaihan dan, karenanya, dalam membentuk narasi masyarakat sangatlah penting karena berita tidak hanya menyediakan informasi tetapi juga menciptakan realitas sosial dengan menekankan aspek tertentu. Teori pembingkaihan Robert Entman (1993) menjadi landasan utama penelitian ini dan menjelaskan bahwa pembingkaihan adalah proses memilih dan menyoroti hal-hal tentang realitas untuk mengembangkan interpretasi tertentu yang mencakup empat komponen utama, yaitu mendefinisikan masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi tindakan. Metode kualitatif ini berlaku untuk pembahasan pembingkaihan aktivitas Kepolisian Republik Indonesia di Kompas.com dan Detik.com.

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana media membentuk opini publik mengenai peran Polri di tengah meningkatnya demonstrasi sosio-politik. Masalah utama yang secara eksplisit diformulasikan adalah: Bagaimana Kompas.com dan Detik.com membingkai peran Polri dalam menangani demonstrasi terhadap tunjangan DPR pada Agustus 2025, dan apa implikasinya bagi persepsi publik di era demokrasi Indonesia? Formulasi ini mencerminkan ketegangan antara elit politik dan masyarakat umum, di mana penanganan Polri terhadap situasi tersebut menjadi titik fokus yang dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik. Alasan penelitian ini juga berasal dari keterbatasan studi sebelumnya, yang jarang menerapkan teori Entman secara mendalam pada demonstrasi spesifik seperti yang terkait dengan tunjangan DPR, terutama dengan perbandingan antara media seperti Kompas.com (dengan gaya jurnalisme mendalamnya) dan Detik.com (dengan pendekatan cepat dan sensasionalnya). Analisis framing ini penting di era digital ketika berita bersifat viral dan dapat membantu mengungkap kemungkinan bias media, yang dapat memengaruhi kebijakan polisi dan hak-hak demonstran, dan juga memungkinkan kemajuan teori komunikasi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis framing laporan berita tentang penanganan demonstrasi terkait tunjangan parlemen oleh Polri melalui lensa teori Robert Entman di Kompas.com dan Detik.com. Secara spesifik, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi unsur-unsur kerangka Entman (definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan) yang diterapkan pada tindakan Polri dalam laporan berita terkait demonstrasi atas tunjangan parlemen di kedua media tersebut.
2. Membandingkan pola framing antara Kompas.com dan Detik.com untuk mengungkap variasi dalam pemilihan dan penekanan aspek narasi Polri.
3. Menganalisis implikasi framing ini terhadap pembentukan persepsi publik mengenai peran Polri sebagai penjaga ketertiban dan pelindung hak asasi manusia dalam demokrasi Indonesia.

Penelitian tentang framing media di Indonesia telah berkembang pesat, terutama sejak penerapan teori Robert Entman dalam studi komunikasi politik. Karya yang berjudul *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm* telah menjadi referensi utama, yang telah diadopsi dalam berbagai konteks global dan lokal (Entman, 1993).

Di Indonesia, dalam *Journal of Communication* menganalisis framing demonstrasi Papua menggunakan elemen Entman, menemukan bahwa media nasional cenderung menggambarkan Polri sebagai pelindung negara daripada aktor represif (Gamaliel *et al.*, 2019). Penelitian serupa dalam *Journal of Communication Science* membahas framing Undang-Undang Omnibus di Detik.com, di mana evaluasi moral sering menonjolkan konflik untuk meningkatkan klikabilitas (Sari, 2021).

Penelitian lain, seperti dalam Jurnal Media Indonesia, membandingkan cara polisi menyajikan informasi di Kompas.com dan media lain selama demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja, menunjukkan variasi interpretasi kausal yang dipengaruhi oleh orientasi editorial (Hidayat, 2022). Namun, penelitian sebelumnya belum fokus pada isu tunjangan DPR dan integrasi penuh elemen Entman untuk perbandingan media digital. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan kualitatif komprehensif, melengkapi literatur dengan analisis kontemporer tentang framing Polri di era media online Indonesia, dan berpotensi memperkaya penerapan teori Entman dalam studi kasus di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini mengadopsi desain deskriptif kualitatif sebagai metode untuk mengkaji secara mendalam representasi media tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait demonstrasi seputar isu tunjangan anggota DPR. Kerangka kerja yang diadopsi adalah kerangka kerja Robert M. Entman (1993), yang menyoroti empat elemen pembingkai, yaitu definisi masalah (definisi masalah), interpretasi kausal (penjelasan akar permasalahan), penilaian moral (evaluasi aktor berdasarkan perilaku etisnya), dan usulan solusi (usulan penanganan). Alasan mengadopsi strategi ini adalah agar memungkinkan untuk mengeksplorasi narasi interpretatif tanpa melakukan generalisasi pada statistik, yang akan sesuai dalam mengungkap pandangan tentang realitas sosial dalam berita digital. Penelitian ini didasarkan pada publikasi di Kompas.com dan Detik.com tentang demonstrasi tersebut, dan objek yang diminati adalah materi editorial dan laporan jurnalistik yang membingkai isu tersebut.

Penelitian ini dilakukan secara daring melalui penggunaan kedua situs tersebut. Populasi penelitian terdiri dari artikel berita mengenai demonstrasi tunjangan DPR yang dilakukan antara 25 Agustus 2025 dan 28 Agustus 2025, dan sampel dipilih dengan menggunakan kriteria berikut: (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia, (2) secara jelas menyatakan peran Kepolisian Nasional dalam demonstrasi, (3) didedikasikan untuk masalah tunjangan DPR, dan (4) mewakili sampel narasi yang berbeda (yaitu, judul berita, opini, atau laporan lapangan). Keputusan untuk menggunakan sampel purposif didasarkan pada fakta bahwa sampel harus representatif untuk memfasilitasi analisis rinci pada kasus-kasus representatif dengan konten yang kaya akan elemen framing, alih-alih sampel besar yang sama yang tidak memiliki kedalaman. Di antara kemungkinan jumlah artikel, 5 artikel dipilih di setiap outlet media (total 10 artikel) karena fakta bahwa artikel tersebut meliputi seluruh proses demonstrasi dan karena mereka mewakili sikap masing-masing outlet media (analitis di Kompas.com dan cepat dan faktual di Detik.com). Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan studi dokumen primer, dengan kata kunci “demonstrasi tunjangan DPR Polri”.

Untuk menganalisis data, teori analisis isi kualitatif Entman diterapkan, dengan pengkodean tematik, interpretasi perbedaan gaya media, perbandingan pola pembingkai, dan sintesis dengan kutipan langsung untuk memberikan kedalaman. Proses analisis dilakukan secara sistematis sebagai berikut: (1) pembacaan awal artikel untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang mereka katakan; (2) identifikasi elemen framing menggunakan model Entman dengan pengkodean manual, seperti menandai kalimat atau paragraf yang memperkenalkan isu (misalnya, "kekerasan demonstran vs. keamanan polisi"), mengidentifikasi penyebabnya (misalnya, "keluhan ekonomi vs. ketidakadilan kebijakan"), mengevaluasi moralitas (misalnya, "polisi sebagai pelindung atau penindas"), dan menyarankan solusi (misalnya, "Metode ini juga selaras dengan prinsip kualitatif, di mana reliabilitas dicapai melalui transparansi, pengulangan, dan pencatatan yang sistematis. Validitas tampaknya

diperoleh melalui penggunaan triangulasi sumber (memeriksa dua outlet media) dan refleksi bias. Saya bekerja sebagai warga negara Indonesia dengan latar belakang jurnalisme, dan sebagai hasilnya, saya mempertimbangkan kemungkinan bias pro-Polri karena pengalaman saya sendiri dan mengurangi risikonya melalui jurnal reflektif.

Tabel 1. Ringkasan Artikel

Judul	Tanggal	Media	Elemen Framing
Aparat Bubarkan Paksa Massa Pengunjuk Rasa Tolak Tunjangan Perumahan Anggota DPR	25, Agustus 2025	Kompas.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Demo 25 Agustus di DPR Ricuh, 15 Orang Ditangkap Polisi	25, Agustus 2025	Kompas.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Polisi Sisir Area Luar DPR, Disoraki Umpatan Massa Demo 25 Agustus	25, Agustus 2025	Kompas.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Penangkapan Ratusan Demonstran Penolak Tunjangan DPR Dinilai Langgar Prosedur	26, Agustus 2025	Kompas.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Demo Mahasiswa 28 Agustus di DPR Ricuh, Polisi Kerahkan Water Cannon	28, Agustus 2025	Kompas.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Cek Massa Demo di Belakang Gedung DPR	25, Agustus 2025	Detik.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Banyak Pelajar Ikut Aksi Demo di DPR, Polisi: Sudah Tidak Kondusif	25, Agustus 2025	Detik.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Polisi Bagikan Air Mineral ke Mahasiswa Saat Demo 25 Agustus di Gedung DPR	25, Agustus 2025	Detik.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
Polisi Ingatkan Pengguna Medsos Tak Ajak Pelajar Demo: Kasihan Mereka	26, Agustus 2025	Detik.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan

Polisi Tegaskan Demo Massa Buruh di Depan DPR Berjalan Kondusif	28, Agustus 2025	Detik.com	Definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, rekomendasi penanganan
---	------------------	-----------	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Tajuk Berita Portal Online Kompas.com dan Detik.com

Kompas.com	Detik.com
Aparat Bubarkan Paksa Massa Pengunjuk Rasa Tolak Tunjangan Perumahan Anggota DPR (25/08/2025)	Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Cek Massa Demo di Belakang Gedung DPR (25/08/2025)
Demo 25 Agustus di DPR Ricuh, 15 Orang Ditangkap Polisi (25/08/2025)	Banyak Pelajar Ikut Aksi Demo di DPR, Polisi: Sudah Tidak Kondusif (25/08/2025)
Polisi Sisir Area Luar DPR, Disoraki Umpatan Massa Demo 25 Agustus (25/08/2025)	Polisi Bagikan Air Mineral ke Mahasiswa Saat Demo 25 Agustus di Gedung DPR (25/08/2025)
Penangkapan Ratusan Demonstran Penolak Tunjangan DPR Dinilai Langgar Prosedur (26/08/2025)	Polisi Ingatkan Pengguna Medsos Tak Ajak Pelajar Demo: Kasihan Mereka (26/08/2025)
Demo Mahasiswa 28 Agustus di DPR Ricuh, Polisi Kerahkan Water Cannon (28/08/2025)	Polisi Tegaskan Demo Massa Buruh di Depan DPR Berjalan Kondusif (28/08/2025)

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Analisis ini menggunakan model framing Robert M. Entman (1993), yang memandang framing sebagai proses selektif oleh media untuk membentuk interpretasi publik melalui empat elemen: (1) Definisi Masalah (identifikasi masalah utama); (2) Interpretasi Penyebab (penyebab masalah); (3) Evaluasi Moral (penilaian etis terhadap aktor); dan (4) Rekomendasi Penanganan (solusi yang diusulkan). Pendekatan kualitatif ini menganalisis sampel 10 artikel (5 dari Kompas.com dan 5 dari Detik.com) pada Agustus 2025, dengan judul berita sebagai indikator naratif utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com memframing isu secara kritis-konflik (menekankan represi polisi), sementara Detik.com lebih netral-proaktif (menekankan peran polisi sebagai penjaga ketertiban). Sintesis ini mengintegrasikan Teori Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1972) dan Konstruksi Sosial Realitas (Berger & Luckmann, 1966) untuk menganalisis dampaknya terhadap legitimasi polisi dalam konteks demokrasi yang terpolarisasi di Indonesia.

Definisi Masalah

Kompas.com: Menggambarkan masalah sebagai konflik struktural antara ketidakadilan tunjangan DPR dan represi polisi, dengan demonstrasi sebagai respons yang sah terhadap masalah sosial (misalnya, judul berita menyoroti pembubaran paksa dan kekerasan, seperti “Pihak Berwenang Membubarkan Demonstrasi Massal dengan Paksa” dan “Demonstrasi Mahasiswa Berakhir dengan Kekerasan, Polisi Gunakan Meriam Air”). Hal ini mendefinisikan polisi sebagai pemicu eskalasi, memperkuat narasi ketegangan demokrasi pasca-reformasi 1998 di mana demonstrasi sering dilihat sebagai ekspresi hak sipil.

Detik.com: Fokus pada gangguan operasional terhadap ketertiban, dengan keterlibatan mahasiswa sebagai elemen rentan (misalnya, “Banyak Mahasiswa Ikut Demonstrasi, Situasi Tidak Kondusif” dan “Polisi Bagikan Air Mineral kepada Demonstran”). Masalah didefinisikan sebagai potensi anarki akibat provokasi eksternal, bukan akar penyebab kebijakan DPR, mencerminkan pendekatan praktis sesuai narasi stabilitas negara di era digital yang rentan terhadap hoaks.

Sintesis: Perbedaan ini mencerminkan gaya editorial Kompas lebih investigatif (mendorong diskusi struktural), Detik lebih reaktif (memprioritaskan keamanan) yang memengaruhi persepsi publik terhadap demonstrasi sebagai ancaman atau hak, berkontribusi pada polarisasi opini di Indonesia di mana media digital sering merusak kepercayaan terhadap institusi.

Interpretasi Kausal

Kompas.com: Menuding tindakan represif Polri menjadi pemicu utama terjadinya eskalasi, di mana penangkapan massal dan tindakan kekerasan yang dilakukan contohnya (misal: “Penangkapan Ratusan Demonstran Dianggap Melanggar Prosedur” dan “Polri Menyisir Area, Diteriaki Massa”). Hal ini menghubungkan konflik ini dengan masalah kegagalan penanganan prosedural yang dilakukan oleh pihak berwenang, secara tersirat menunjukkan bahwa ketidakadilan sistematis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pemicu awalnya, sejalan dengan catatan sejarah mengenai polisi sebagai peninggalan era Orde Baru.

Detik.com: Detik.com: Membebaskan kesalahan kepada para demonstran ataupun faktor eksternal, contohnya dampak penggunaan jejaring media sosial di kalangan mahasiswa (misal: “Polisi mengimbau Pengguna Media Sosial untuk Tidak Memprovokasi Mahasiswa Berdemonstrasi” dan “Panglima Militer dan Kepala Kepolisian Meninjau Kerumunan Demonstran”). Polri ditampilkan sebagai institusi yang responsif terhadap ancaman, menjustifikasi tindakan intervensi sebagai langkah preventif, mencerminkan konteks Indonesia di mana demonstrasi sering dihubungkan dengan politisasi setelah pemilu dan radikalisme.

Sintesis: Interpretasi kausal Kompas mempertegas penafsiran kausalitas struktural penindasan - eskalasi, sebaliknya Detik mengedepankan kausalitas operasional provokasi - intervensi, yang memengaruhi persepsi publik terhadap Kepolisian Nasional sebagai penindas atau pelindung, dengan implikasi terhadap dinamika sosio-politik di mana media memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Evaluasi Moral

Kompas.com: Menilai Polri secara negatif sebagai aktor represif yang melanggar etika (contoh: “Pencabutan Paksa” dan “Pelanggaran Prosedur Penangkapan”), sementara demonstran digambarkan sebagai korban yang sah yang menuntut keadilan. Hal ini menciptakan dilema moral di mana Polri gagal menegakkan hak asasi manusia, mencerminkan masalah legitimasi Polri di Indonesia yang masih dihantui oleh pelanggaran masa lalu seperti di Timor Timur.

Detik.com: Memberikan penilaian positif terhadap Polri sebagai entitas yang humanis dan bertanggung jawab (contoh: “Polisi Membagikan Air Mineral” dan “Menjamin Demonstrasi Damai”), dengan demonstran (terutama mahasiswa) sebagai pihak yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Hal ini membangun citra moral Polri sebagai penjaga harmoni, sejalan dengan narasi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik di tengah tantangan demokrasi digital.

Sintesis: Evaluasi moral yang kontras negatif di Kompas (penindasan vs. hak asasi) vs. positif di Detik (perlindungan vs. kerentanan) menunjukkan bias editorial yang memengaruhi persepsi etis terhadap polisi, dengan Kompas mendorong refleksi kritis tentang reformasi institusional, sementara Detik mendukung status quo, berkontribusi pada fragmentasi opini di masyarakat multikultural Indonesia.

Rekomendasi Penanganan

Kompas.com: Menganggap Polri secara negatif sebagai pelaku tindakan kekerasan yang menyalahi aturan (misalnya, “Pengusiran Paksa” dan “Pelanggaran Prosedur Penangkapan”),

sedangkan demonstran dicitrakan sebagai pihak di luar hukum yang menuntut keadilan. Kondisi ini melahirkan sebuah dilema moral di mana Polri dinilai gagal dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, mencerminkan persoalan keabsahan Polri yang masih dibayangi oleh kasus pelanggaran di masa lalu, seperti yang pernah terjadi di Timor Timur.

Detik.com: Menampilkan kesan polisi sebagai figur heroik dan penuh tanggung jawab (misalnya, “Polisi Membagikan Air Mineral” dan “Menjaga Demonstrasi Berjalan Damai”), dengan demonstran (terutama mahasiswa) sebagai kelompok masyarakat yang perlu dilindungi. Situasi ini membangun reputasi baik polisi selaku pengayom ketertiban, sejalan dengan misi pemerintah untuk memperkokoh keyakinan publik di era demokrasi berbasis digital.

Sintesis: Penilaian moral yang berlawanan di Kompas (penindasan vs. hak asasi manusia) dan Detik (perlindungan vs. kerentanan) menampakkan adanya bias editorial yang mempengaruhi persepsi etis terhadap polisi, di mana Kompas mengedepankan refleksi kritis terhadap reformasi kelembagaan, sebaliknya Detik mengedepankan status quo, yang berperan dalam menciptakan perpecahan pendapat di kalangan masyarakat Indonesia yang beragam.

KESIMPULAN

Penelitian kualitatif ini dapat disimpulkan bahwa pemberitaan Kompas.com dan Detik.com perihal penanganan demonstrasi oleh Polri dalam menentang tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Agustus 2025 menimbulkan narasi bertolak belakang melalui mekanisme framing Robert M. Entman. Kompas.com melakukan pembingkaihan kritis dan negatif dengan menitikberatkan pada eskalasi konflik, tindakan represif pihak berwenang, serta adanya pelanggaran prosedural seperti pembubaran paksa dan penangkapan massal. Di pihak lain, Detik.com melakukan pembingkaihan positif dan netral yang menonjolkan peran proaktif Polri dalam memelihara ketertiban dan menangkal provokasi, termasuk keterlibatan mahasiswa. Integrasi dengan Teori Agenda-Setting McCombs dan Shaw (1972) menggambarkan bagaimana kedua media tersebut membentuk preferensi publik yang berbeda: Kompas.com mengutamakan agenda reformasi dan akuntabilitas Polri, sedangkan Detik.com mengutamakan stabilitas sosial. Temuan ini sejalan dengan Teori Konstruksi Sosial Realitas Berger dan Luckmann (1966), di mana narasi media membentuk realitas kolektif yang memengaruhi internalisasi pandangan publik, berpotensi menyebabkan polarisasi opini dengan Polri dipandang sebagai represif atau pelindung, tergantung pada sumber berita yang dikonsumsi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori framing dalam konteks media digital Indonesia dengan memperlihatkan bagaimana platform seperti Kompas.com dan Detik.com mereproduksi dan memperkuat framing melalui elemen digital seperti kecepatan distribusi berita dan interaksi pengguna, yang memperkaya pemahaman tentang persimpangan antara framing, agenda-setting, dan konstruksi sosial di tengah dinamika demokrasi pasca-reformasi. Kontribusi ini menghadirkan bukti empiris baru dari kasus demonstrasi aktual, menghubungkan teori Barat dengan nuansa beragam dan kemajemukan budaya politik Indonesia. Dari perspektif praktis, temuan ini memiliki implikasi bagi jurnalis untuk dapat meningkatkan kesadaran akan bias framing demi menciptakan liputan yang lebih berimbang dan etis; bagi pembuat kebijakan di Polri dan pemerintah, yang disarankan untuk dapat memfasilitasi dialog inklusif antara pihak berwenang, demonstran, dan masyarakat guna memperkecil polarisasi; serta bagi inisiatif pendidikan literasi media, yang harus diperkuat melalui implementasi dalam kurikulum pendidikan dan kampanye nasional untuk membangun kemampuan menganalisis berita digital secara kritis, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari perpecahan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan peran krusial media digital dalam pembentukan opini publik dalam demokrasi Indonesia, dengan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi dampak jangka panjang terhadap legitimasi Polri melalui survei audiens atau analisis komparatif dengan media konvensional lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Acheampong, A. O., & Taden, J. (2024). Does Social Media Penetration Enhance Democratic Institutions? Evidence from Varieties of Democracy Data. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03329-4>
- Chan, M., & Yi, J. (2024). Social Media Use and Political Engagement in Polarized Times. Examining the Contextual Roles of Issue and Affective Polarization in Developed Democracies. *Political Communication*, 41(5), 743–762. <https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2325423>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In *Journal of Communication* (Vol. 43, Issue 4).
- Fadil Muharrom, Oriza Putri Feriyanti, & Radivan, Z. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Gelap Pada Media Online CNNIndonesia.com dan Tempo.Co (Analisis Framing R Entman). *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2434>
- Febriani, T., Handayani, L., & Sevilla, V. (2022). Analisis Framing Polri pada Penanganan Demonstrasi UU Cipta Kerja di Kompas.com dan Detik.com. *JURNAL PUSTAKA KOMUNIKASI*, 5(1), 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1814>
- Han, S. (2024). Media framing in the Digital Age: Interplay of Real Estate and Welfare Narratives in South Korean News Articles. *Heliyon*, 10(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25696>
- Hofmann, J. (2019). Mediated Democracy – Linking Digital Technology to Political Agency. *Internet Policy Review*, 8(2). <https://doi.org/10.14763/2019.2.1416>
- Karyotakis, M.-A., Panagiotou, N., Antonopoulos, N., & Kiourexidou, M. (2017). Digital Media Framing of the Egyptian Arab Spring: Comparing Al Jazeera, BBC and China Daily. *Studies in Media and Communication*, 5(2), 66. <https://doi.org/10.11114/smc.v5i2.2664>
- Kluknavská, A. (2024). Game of frames: a Content Analysis of Politicians' Framing of Public Service Media on Facebook and Instagram in the Czech Republic. *Journal of Contemporary European Studies*, 33(2), 672–686. <https://doi.org/10.1080/14782804.2024.2389122>
- Pratiwi, M. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kepolisian Indonesia oleh Media Massa Online Tahun 2021: Pendekatan Robert Entman. <http://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/2860/1/MEILINA%20ANUNG%20PRATIWI%2018410020.pdf>
- Sakinah, V., & Rachmaria, L. (2021). Pembingkai Berita Revisi UU KPK Tahun 2019 di Media Online (Analisis Framing Robert M. Entman Di Kompas.com Periode 22 – 25 September 2019). *PANTAREI*, 5(2), 1. <https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/view/707>
- Sartika, C. D., Anshori, D. S., & Kusumah, E. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Kawal Putusan MK pada Kompas.com (Indonesia, Trans.). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 206. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3823>
- Van Den Hoven, J., Stauch, M., Musiani, F., Domingo-Ferrer, J., Ruggieri, S., Pratesi, F., Trasarti, R., & Comandé, G. (2024). *Democracy in the Digital Age*. <https://shs.hal.science/halshs-04844505v1>